



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG

JALAN RAYA CARITA KM 4.5 DESA CARINGIN, KECAMATAN LABUAN,
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, KODE POS 42264
TELEPON (0253) 802626, FAKSIMILE (0253) 802616
LAMAM <https://kkp.go.id> SUREL lpri@serang.kkp.go.id

Nomor : B.851/LPRL.1/TU.140/VII/2026 17 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 LPRL Serang

Yth. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Di Jakarta

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Loka PRL Serang pada periode Triwulan II Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan dokumen Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang menjabarkan capaian kinerja LPRL Serang pada periode dimaksud sebagaimana terlampir. Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Penataan Ruang
Laut Serang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Santoso Budi Widiarto

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, DJPRL, KKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



Laporan Kinerja

TRIWULAN II TAHUN 2026

LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja Loka PRL Serang 2026 TW II

Pengarah : Santoso Budi Widiarto, S.Sos. M.P.
Kepala Loka PRL Serang

Penyusun : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Loka Penataan Ruang Laut Serang
Tahun Anggaran 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Tahun 2026. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas LPRL Serang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis LPRL Serang pada kurun waktu Triwulan II Tahun Anggaran 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.



Santoso Budi Widiarto
Kepala Loka PRL Serang

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, harapan kami laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan periode yang akan datang sehingga penyelenggaraan program dan kebijakan LPRL Serang ke depan menjadi lebih baik sekaligus memberikan kontribusi yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Pandeglang, 17 Juli 2025
Kepala LPRL Serang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Santoso Budi Widiarto



RINGKASAN EKSEKUTIF

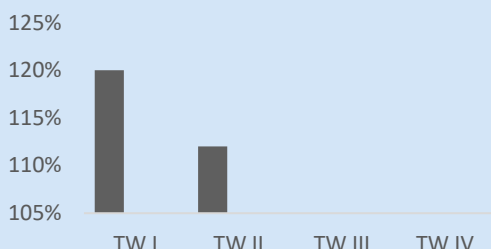
Pada Tahun 2026, Loka PRL Serang memiliki:

- **5 Sasaran Kegiatan**
- **16 Indikator Kinerja (IK)**
2 IK dengan frekuensi Triwulan telah tercapai menghasilkan NKO sebesar **112% (Istimewa)**

Dari 16 Indikator Kinerja pada TW II 2026,

- IK 10 dengan capaian 120%
- IK 11 dengan capaian 100%
- 14 IK belum ada capaian karena frekuensi tahunan

NKO LPRL Serang 2026



Realisasi Anggaran Tahun 2026 LPRL Serang

DIPA LPRL Serang belum terbit sehingga belum adanya realisasi anggaran

Realisasi anggaran : -
Pagu anggaran : -
Blokir : -
% realisasi (Blokir) : -
% realisasi (- Blokir) : -

Laporan Kinerja (LKj) Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja organisasi sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di Triwulan II, LPRL Serang memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112%** dengan **Kategori Istimewa**. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya 2 target pada Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL dengan capaian sebesar 120%, serta Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang telah tercapai 100%.

Pelaksanaan kinerja LPRL Serang pada

Triwulan II Tahun 2026 masih diwarnai oleh proses penyesuaian sebagai dampak transformasi organisasi dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang menjadi Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang seperti belum terbitnya DIPA LPRL Serang TA 2026 sehingga proses capaian IKU terhambat di tahapan perencanaan kegiatan.

Sebagai upaya meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, LPRL Serang akan melaksanakan koordinasi intensif dengan unit pusat terkait penyelesaian proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026, melakukan penyesuaian Rencana Aksi sesuai dengan DIPA yang ditetapkan, serta memperkuat monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dan penyampaian laporan SPIP pada Triwulan III. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja organisasi secara optimal pada semester berikutnya.





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Permasalahan Utama	2
D. Tugas Dan Fungsi LPRL Serang	3
E. Kepegawaian	5
F. Sistematika Penyajian	6
BAB 2	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Kepmen KP Nomor 91 Tahun 2024)	7
B. Sasaran Kegiatan LPRL Serang	8
C. Rencana Kinerja Tahunan	8
D. Penetapan Kinerja Tahun 2026	8
BAB 3	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
SK. 1. Terasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	16
IK. 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	16
IK. 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	18
IK. 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	21
SK. 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Serang	24
IK. 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	24
SK. 3. Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	33
IK. 5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	34





SK. 4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	36
IK. 6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	37
SK. 7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang	39
IK. 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup LPRL Serang (Nilai)	39
IK. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)	43
IK. 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)	45
IK. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%).....	51
IK. 11. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Dokumen).....	53
IK. 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks)	55
IK. 13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai).....	60
IK. 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)	63
IK. 15. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang (Nilai).....	65
IK. 16. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang (%).....	68
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	70
Pagu Anggaran.....	70
C. PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL	Error! Bookmark not defined.
BAB 4	71
PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Permasalahan dan Saran Perbaikan	71
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya.....	72
LAMPIRAN	73





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi LPRL Serang	5
Gambar 2. Hasil pengukuran capaian Kinerja LPRL Serang pada Aplikasi Kinerja Triwulan II 2026.....	13
Gambar 3. Asistensi Materi Teknis Perairan dan Pesisir (MTPP) Jawa Barat	20
Gambar 4 Pembahasan Penggunaan Garis Pantai BIG Tahun 2025.....	20
Gambar 5 Pembahasan Hasil Survei dan Pengumpulan Data Ocean Account-Karbon Biru RZR Kawasan Batang.....	23
Gambar 6 Konsultasi Teknis Dokumen Kawasan Konservasi Taman Penyu Pangumbahan ...	23
Gambar 7 Bimbingan Teknis Perizinan di Gunungkidul	33
Gambar 8 Rapat Tindak Lanjut Validasi Data Identifikasi KKPRL belum berizin	36
Gambar 9 Identifikasi kelompok masyarakat di Kabupaten Lebak	39
Gambar 10 Rapat Pra-Evaluasi SAKIP Lingkup DJPRL Tahun 2026.....	42
Gambar 11 Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen TW II	52
Gambar 12 Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I	54
Gambar 13 Pemantauan IP ASN Pegawai LPRL Serang melalui Website PILAR.....	59
Gambar 14 Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan V Tahun 2026	60
Gambar 15 Rapat evaluasi PJLP, PPPK Paruh Waktu, dan Magang Lingkup LPRL Serang ...	60
Gambar 16 Produksi konten Triwulan II di Media Sosial LPRL Serang	62
Gambar 17 PETA Carita dan SI KRISTAL sebagai Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik LPRL Serang	65
Gambar 18 Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan V Tahun 2026	68





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Pegawai Loka PRL Serang Tahun 2026.....	5
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPRL Serang Tahun 2026	9
Tabel 3. Perbandingan Target Indikator Kinerja Tahun 2026 dan Tahun 2025.....	11
Tabel 4. Rincian Capaian Indikator Kinerja LPRL Serang Tahun 2026	14
Tabel 5. Rincian Capaian IK 1 Tahun 2026.....	16
Tabel 6. Rincian Capaian IK 2 Tahun 2026.....	19
Tabel 7. Rincian Capaian IK 3 Tahun 2026.....	22
Tabel 8. Rincian Capaian IK 4 Tahun 2026.....	26
Tabel 9. Rincian Capaian IK 5 Tahun 2025.....	34
Tabel 10. Rincian Capaian IK 6 Tahun 2026.....	37
Tabel 11. Interpretasi dari Predikat dan Nilai PM SAKIP	40
Tabel 12. Rincian Capaian IK 7 Tahun 2026.....	41
Tabel 13. Bobot NKPA Satker.....	43
Tabel 14. Rincian Capaian IK 8 Tahun 2026.....	44
Tabel 16. Rincian Capaian IK 9 Tahun 2026.....	50
Tabel 17. Rincian Capaian IK 10 Tahun 2026.....	51
Tabel 18. Rincian Capaian IK 11 Tahun 2025.....	54
Tabel 20. Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan minimal diangkat kedalam Jabatan	56
Tabel 21. Rincian Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan	56
Tabel 24. Rincian Keterangan Nilai SKP dan Nilai Disiplin.....	57
Tabel 25. Rincian Kategori Nilai IP ASN	57
Tabel 26. Rincian Capaian IK 12 Tahun 2025.....	58
Tabel 27. Rincian Capaian IK 13 Tahun 2026.....	61
Tabel 28. Rincian Capaian IK 14 Tahun 2026.....	63
Tabel 29. Nilai dan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan.....	66
Tabel 30. Rincian Capaian IK 15 Tahun 2026.....	67
Tabel 31. Rincian Capaian IK 16 Tahun 2026.....	69



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unit organisasi level II yang baru menjalani restrukturisasi kelembagaan, Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang merupakan hasil transformasi dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang. Sebelumnya, LPSPL Serang melaksanakan tugas dan fungsi yang berasal dari dua unit Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Melalui restrukturisasi tersebut, LPRL Serang kini berfokus melaksanakan tugas dan fungsi di bawah satu unit Eselon I, yaitu DJPRL. Transformasi organisasi ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, yang mulai berlaku pada 31 Desember 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, LPRL Serang melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi, LPRL Serang menyusun Laporan Kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Laporan Kinerja yang disusun diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan faktor penyebab keberhasilan/kegagalan dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja LPRL Serang Triwulan II Tahun 2026 adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKU yang dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan II Tahun 2026;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU Triwulan II Tahun 2026;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Triwulan II Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja LPRL Serang Triwulan II Tahun 2026 adalah:

1. Memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU pada Triwulan II Tahun 2026;
2. Memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU pada Triwulan II Tahun 2026;
3. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdayaguna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada periode berikutnya.

1.3 Permasalahan Utama

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut seluas 6,4 juta km² yang menjadi ruang hidup, sumber ekonomi, dan arena interaksi berbagai kepentingan lintas sektor. Kebutuhan ruang yang terus meningkat tidak sebanding dengan ruang darat yang tetap, menjadikan aktivitas manusia berekspansi ke ruang laut. Pengembangan ekonomi Biru sebagai arah kebijakan nasional juga mendorong ruang laut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis, antara lain perikanan, konservasi, transportasi laut, pariwisata, energi, pertahanan, serta pembangunan infrastruktur, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan apabila tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ekonomi biru menuntut pemanfaatan ruang laut yang produktif sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Tantangan yang muncul adalah memastikan setiap pemanfaatan ruang laut memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Dibentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai bagian dari transformasi kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi biru di tengah tantangan penataan ruang laut Indonesia yang semakin kompleks. Seiring dengan itu, LPRL Serang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah DJPRL memiliki peran strategis untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan penataan ruang laut melalui program dan kegiatan. Sejumlah permasalahan utama yang menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut:

a. Keberlanjutan sumber daya dan ekosistem

Pengelolaan ruang laut perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, perlindungan habitat penting, konektivitas ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Pendekatan berbasis ekologi menjadi tantangan sekaligus kebutuhan utama dalam setiap proses perencanaan ruang laut.

b. Sinkronisasi Tata Ruang Darat dan Laut

Wilayah pesisir merupakan ruang transisi antara darat dan laut yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, penataan ruang laut perlu diselaraskan dengan tata ruang darat agar pembangunan wilayah berjalan terpadu dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

c. Pengumpulan Data dan Sistem Informasi Kelautan

Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi fondasi pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi adalah pengumpulan data, integrasi data ke dalam



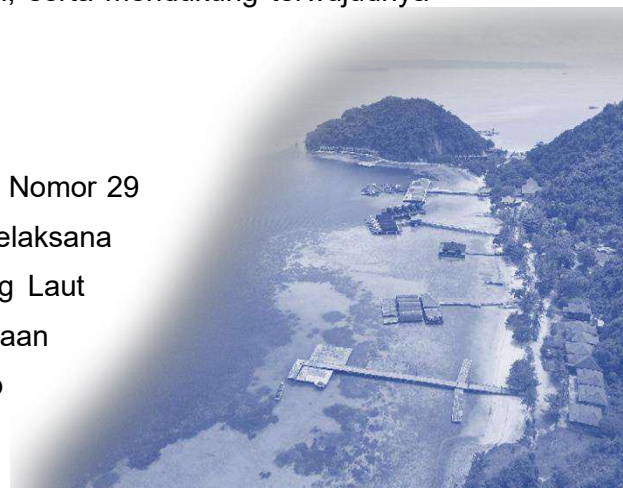
sistem informasi kelautan, sinkronisasi data lintas sektor, serta peningkatan transparansi dan akses informasi publik.

- d. Meningkatnya aktivitas di wilayah pesisir dan laut, seperti perikanan, konservasi, pertahanan, transportasi laut, pariwisata, energi, dan kegiatan industri lainnya, menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang. Kondisi ini memerlukan perencanaan dan pengendalian ruang laut yang harmonis antar sektor.
- e. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum
Masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan layanan publik yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum khususnya dalam proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi kebutuhan utama.
- f. Penguatan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna
Keberhasilan penataan ruang laut sangat bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Tantangannya adalah memastikan partisipasi publik berlangsung inklusif, substantif, dan berkelanjutan.
- g. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- h. Penataan Ruang Laut yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim
Dampak perubahan iklim seperti abrasi, kenaikan muka air laut, banjir rob, dan perubahan ekosistem pesisir memerlukan kebijakan ruang laut yang responsif dan adaptif. Perencanaan ruang laut perlu mempertimbangkan risiko iklim serta ketahanan wilayah pesisir.

Berbagai permasalahan utama tersebut menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan LPRL Serang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif, adaptif, akuntabel, serta mendukung terwujudnya penataan ruang laut yang berkelanjutan.

1.4 Tugas Dan Fungsi LPRL Serang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut, Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang merupakan Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



LPRL Serang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja LPRL Serang meliputi 11 (sebelas) provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, LPRL Serang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- 3) pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6) pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi, dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- 7) pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- 8) pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi;
- 9) pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- 10) pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
- 11) pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut;



- 12) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) pelaksanaan urusan ketatausahaan



Gambar 1. Struktur Organisasi LPRL Serang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPRL Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.5 Kepegawaian

Jumlah pegawai LPRL Serang sebanyak 62 orang terdiri dari 40 orang PNS, 9 Orang PPPK, dan 2 Orang PJLP, Laki-laki 42 orang dan Perempuan 20 orang. Komposisi pegawai berdasarkan penempatan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Pegawai Loka PRL Serang Tahun 2026

No	Lokasi Kantor / Penempatan	Jumlah Pegawai		Pendidikan			Total
		Laki-laki	Perempuan	S2	S1/D4	D3 / SMA	
1	LPRL Serang Labuan	29	9	3	18	17	38
2	Satpel Jakarta	4	1		5		5
3	Wilker Jawa Barat	1	1		2		2
4	Satpel Semarang	1	3	1	3		4
5	Wilker D.I.Yogyakarta		2		2		2
6	Wilker Jawa Timur	1	2	1	2		3
7	Satpel Balikpapan	1	1		2		2
8	Wilker Kalimantan Barat	3	1		4		4
9	Wilker Kalimantan Selatan	2			2		2
	Jumlah	42	20				62



1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja LPRL Serang Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Kata Pengantar**
2. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2026.
3. **Daftar Isi**
4. **Daftar Gambar/Tabel**
5. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, struktur organisasi dan jumlah pegawai LPRL Serang, permasalahan utama dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, serta sistematika penyusunan laporan.
6. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini menguraikan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan LPRL Serang tahun 2026, rencana kinerja tahun 2026, dan perjanjian kinerja LPRL Serang tahun 2026.
7. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisa capaian kinerja.
8. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja LPRL Serang serta langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Kepmen KP Nomor 91 Tahun 2024)

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja KKP) Tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan KKP pada tahun kedua pelaksanaan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Renja ini disusun dengan mengacu pada tema *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026*, yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang sejalan dengan visi RPJMN 2025–2029: “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*”

Pada tahun 2026, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan berbasis sumber daya akuatik (*blue food*) dan garam nasional, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi biru (*blue economy*). Prinsip ekonomi biru dijadikan pijakan utama dalam arah pembangunan sektor ini, dengan menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan pelestarian ekosistem laut.

Arah kebijakan KKP tahun 2026 difokuskan pada lima pilar utama, yaitu:

- 1) Perluasan kawasan konservasi laut;
- 2) Implementasi Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota;
- 3) Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil; dan
- 5) Pembersihan sampah laut melalui partisipasi aktif nelayan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan nasional tersebut, KKP menetapkan sejumlah program prioritas dan proyek strategis nasional (PSN), di antaranya:

- 1) Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, untuk mencapai swasembada garam melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penerapan teknologi modern produksi garam;
- 2) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sebagai upaya pengentasan kemiskinan nelayan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir;
- 3) Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) dan klaster rumput laut berbasis kawasan, guna memperkuat ketahanan pangan serta pengembangan ekonomi biru berbasis masyarakat;
- 4) Revitalisasi laboratorium jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk hasil laut di pasar nasional dan ekspor



Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

- a) peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
- b) peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
- c) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang memiliki 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Program Dukungan Manajemen

2.2 Sasaran Kegiatan LPRL Serang

LPRL Serang menjalankan 2 (dua) program antara lain: (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan (2) Program Dukungan Manajemen yang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang laut yang dapat mendukung pengembangan ekonomi biru berdaya saing, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi masyarakat pesisir di wilayah kerja LPRL Serang.

Dari program tersebut, sasaran kegiatan yang ingin dicapai LPRL Serang pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang
2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang
3. Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang
4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup LPRL Serang

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, LPRL Serang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat penetapan DIPA pada satker LPRL Serang. Proses penetapan DIPA masih dalam tahap pengajuan usulan penetapan KPA.

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2026

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai penjabaran dari sasaran yang akan dicapai dalam penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Tahun 2026, LPRL Serang menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Kepala LPRL



Serang dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 11 Maret 2026. Loka PRL Serang pada tahun 2026 mempunyai 5 (Lima) Sasaran Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 6 (enam) Indikator.
2. Indikator Kinerja Manajerial (IKM) sebanyak 10 (sepuluh) Indikator.

Target dari masing masing Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Manajerial, tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPRL Serang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	2
		2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	80
		3	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	3
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	75
3.	Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RTZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik linkgkup LPRL Serang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup LPRL Serang (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LPRL Serang (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LPRL Serang (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Dokumen)	3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks)	81
		13.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang (Nilai)	75
		16.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Serang (%)	77

IKU	Indikator Kinerja Utama
IKM	Indikator Kinerja Manajerial

B. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan 2025.

Sebagai Unit Organisasi level 2 yang baru saja melakukan restrukturisasi kelembagaan, LPRL Serang bertransformasi dari sebelumnya LPSL Serang yang mengemban program dan kegiatan dari 2 buah eselon I yaitu DJPRL dan DJPK, menjadi 1 buah eselon I yaitu DJPRL saja. Adanya restrukturisasi ini menghasilkan perjanjian kinerja yang sama sekali berbeda bila dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2025. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut::

Tabel 3. Perbandingan Target Indikator Kinerja Tahun 2026 dan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET 2025
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	2	-
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	80	-
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	3	-
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Serang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	75	-
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	100	-
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	3	-
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Serang (Nilai)	70	-
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Serang (Nilai)	71,75	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET 2025
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Serang (Nilai)	89,5	-
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)	81	-
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Laporan)	3	-
		12.	Indeks Profesionalitas ASN LPRL Serang (Indeks)	81	-
		13.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai)	92	-
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)	1	-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang (Nilai)	75	-
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Serang (%)	77	-

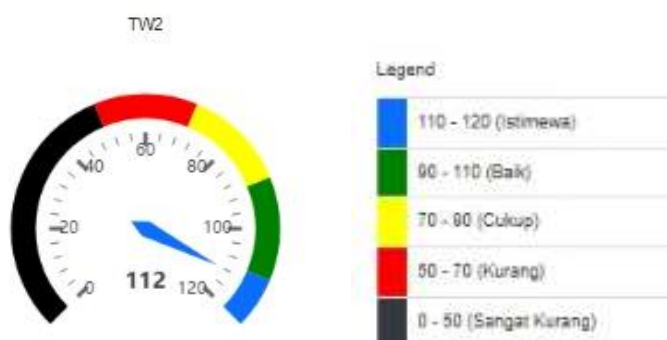


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala LPRL Serang dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), dilakukan pengukuran capaian kinerja Triwulan II 2026 dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja (rencana) dengan realisasi, baik Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja yang capaiannya dapat diukur secara triwulanan, semesteran dan tahunan yang sudah diperhitungkan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja yang dimaksud.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada LPRL Serang, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.



Gambar 2. Hasil pengukuran capaian Kinerja LPRL Serang pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan II 2026

Berdasarkan Hasil pengukuran kinerja menggunakan aplikasi kinerjaku pada Triwulan II 2026 LPRL Serang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112%, kategori **Istimewa**. Terdapat dua IKM yang berkontribusi pada capaian NKO ini yaitu: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL dengan capaian sebesar 104%, dan 2) Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang telah tercapai 100%. Adapun secara lebih rinci, capaian kinerja dari target Triwulan II disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Capaian Indikator Kinerja LPRL Serang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	Target		Capaian TW II	% Capaian
							2026	TW II		
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	2	-	-	-
		2	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	80	-	-	-
		3	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	Kawasan	Tahunan	Posisi Akhir	3	-	-	-
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	75	-	-	-
3.	Terlaksananya Dukungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RTZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	100	-	-	-
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	Lokasi	Tahunan	Posisi Akhir	3	-	-	-
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup LPRL Serang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	70	-	-	-





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FREKUENSI	POLA HITUNG	Target		Capaian TW II	% Capaian
							2026	TW II		
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	71,75	-	-	-
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	89,5	-	-	-
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)	%	Triwulan	Rata-Rata	81	100	100	120
		11.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Dokumen)	Dokumen	Triwulan	Posisi Akhir	3	1	1	100
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks)	Indeks	Tahunan	Posisi Akhir	81	-	-	-
		13.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	92	-	-	-
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan (Inovasi)	Inovasi	Tahunan	Posisi Akhir	1	-	-	-
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang (Nilai)	Nilai	Tahunan	Posisi Akhir	75	-	-	-
		16.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Serang (%)	%	Tahunan	Posisi Akhir	77	-	-	-



Secara rinci capaian masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) LPRL Serang pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

SK. 1. Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang

Pencapaian sasaran kegiatan Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

IK. 1. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi adalah kawasan berupa ruang laut nasional, Kawasan Antar Wilayah (KAW), Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Sementara itu, penyusunan dokumen perencanaan dapat berupa penyusunan dokumen RZ, revisi dokumen RZ yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali, atau penyusunan pembaharuan dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun.

Perhitungan capaian indikator Kinerja Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang, yaitu dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang telah dilaksanakan pendampingan penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang perairan dan/atau rencana zonasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rincian Capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Capaian IK 1 Tahun 2026

IK.1		Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	2	-	2	-

A. Capaian Indikator Kinerja 1 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Indikator Kinerja Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (IK.1) dilakukan di akhir tahun dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu pada Triwulan II Indikator kinerja ini belum memiliki capaian yang dapat diukur.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena Indikator Kinerja ini baru muncul di tahun 2026 dengan ditetapkannya unit Kerja LPRL Serang berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Sampai dengan Triwulan II, Indikator Kinerja ini masih dalam tahap perencanaan disebabkan belum terbitnya DIPA LPRL Serang.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini yaitu penggunaan anggaran dan ketersediaan SDM dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi secara daring dan berkolaborasi dengan instansi daerah terdekat.

F. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Menghadiri Diskusi Tematik Penyusunan Matek RZ KSN Jabodetabek-Punjur
2. Menghadiri Diskusi Penyusunan Dokumen Final RZ KSN Karbon Biru Perairan Sapudi dskt dan Peninjauan Kembali RZ KAW Laut Jawa
3. Melakukan pembahasan kegiatan dan rencana anggaran Tim Kerja PRP dan Pengendalian, LPRL Serang
4. Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Isu Strategis dalam Penyusunan Muatan RZ KSN Jabodetabek-Punjur
5. Melakukan pembahasan KAK dan HPS Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru



IK. 2. Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)

Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) merupakan wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir yang menyusun Rencana Tata Ruang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi RTRW Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab/Kota.

Fasilitasi pendampingan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan melalui dukungan pengumpulan, verifikasi data tematik spasial dan/atau non spasial. Sementara itu, fasilitasi dukungan pendampingan dalam rangka sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota terhadap dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Pada Tahun 2026, LPRL Serang memiliki dua provinsi target untuk pendampingan Peninjauan Kembali dokumen MTPP yaitu Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Baru, dan tidak ada target pada periode tahun sebelumnya. Ketercapaian Indikator Kinerja ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$R = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- R : Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir
- a : Jumlah dokumen pendampingan yang diproses pada tahun berjalan
- b : Jumlah usulan pendampingan yang masuk pada tahun berjalan

catatan: jika tidak terdapat usulan pada tahun berjalan maka capaian dihitung sesuai target

Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang pada Triwulan II 2025 disajikan pada Tabel 6 berikut ini



Tabel 6. Rincian Capaian IK 2 Tahun 2026

IK.2		Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	80	-	80	-

A. Capaian Indikator Kinerja 2 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 2 Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025, karena Indikator Kinerja ini baru muncul di tahun 2026 dengan ditetapkannya unit Kerja LPRL Serang berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV. Kendala yang dihadapi adalah belum ditetapkannya DIPA LPRL Serang sehingga proses capaian IKU terhambat di tahapan perencanaan kegiatan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target IK.2 ini yaitu penggunaan anggaran dan ketersediaan SDM dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi secara daring dan berkolaborasi dengan instansi daerah terdekat.



F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Rapat pembahasan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Jawa Barat
2. Rapat Laporan Pendahuluan Penyusunan Materi Teknis Perairan Jawa Barat
3. Pembahasan dalam percepatan Integrasi RTRW Kalimantan Tengah
4. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk Tata Ruang Jawa Barat
5. FGD Konfirmasi Data dalam Pembaharuan Dokumen MTPP RTRW Jawa Barat
6. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR
7. Rapat Progres Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Jawa Barat



Gambar 3. Asistensi Materi Teknis Perairan dan Pesisir (MTPP) Jawa Barat

8. Pembahasan Garis Pantai BIG Tahun 2025 dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Jawa Barat



Gambar 4 Pembahasan Penggunaan Garis Pantai BIG Tahun 2025

9. Diskusi tim kerja terkait dinamika perubahan garis pantai untuk mendukung penyusunan Peta Dasar MTPP Jawa Barat



10. Penyampaian Hasil Identifikasi Perubahan Garis Pantai Jawa Barat dalam Penyusunan Peta Dasar MTPP Jawa Barat
11. Rapat Tim Penyusun (Pokja) Materi Teknis Perairan Pesisir
12. Rapat Pengaturan Zona Kawasan dan Lahan Pergaraman dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat
13. Pembahasan lanjutan penggunaan garis pantai BIG tahun 2025 dalam rangka Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Jawa Barat
14. Rapat koordinasi lintas sektor Rancangan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR
15. Pembahasan batas wilayah ruang darat dan laut Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat
16. Rapat persiapan Konsultasi Publik Dokumen Awal Materi Teknis Perairan Pesisir RTRW Provinsi Jawa Barat
17. Konsultasi Publik Dokumen Awal Materi Teknis Perairan Pesisir RTRW Provinsi Jawa Barat
18. Rapat Tim Pokja penyusunan MTPP Jawa Barat

IK. 3. Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)

Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil adalah wilayah perairan pesisir dan perairan lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam, sosial, lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Perencanaan. Rencana Zonasi Rinci yang selanjutnya disingkat RZR adalah rencana detail tata ruang laut sebagai rencana rinci dari RZ KAW, RTR KSN, dan RTR Wilayah Provinsi. Dukungan pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil yang dilakukan UPT adalah melalui dukungan pengumpulan, verifikasi, dan/atau permodelan data tematik spasial dan non spasial dan/atau profil kawasan.

Capaian Indikator Kinerja kawasan yang difasilitasi pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang diukur dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil. Terdapat tiga kawasan yang dijadikan target pada tahun 2026 yaitu KEK Industropolis Batang, KI Wijaya Kusuma, dan KBM Marunda.



Rincian Capaian Indikator Kinerja kawasan yang difasilitasi pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah ini

Tabel 7. Rincian Capaian IK 3 Tahun 2026

IK.3		Kawasan yang difasilitasi pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	3	-	3	-

A. Capaian Indikator Kinerja 3 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 3 kawasan yang difasilitasi pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja kawasan yang difasilitasi pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena Indikator Kinerja ini baru muncul di tahun 2026 dengan ditetapkannya unit Kerja LPRL Serang berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV. Kendala yang dihadapi adalah belum ditetapkannya DIPA LPRL Serang sehingga proses capaian IKU terhambat di tahapan perencanaan kegiatan.

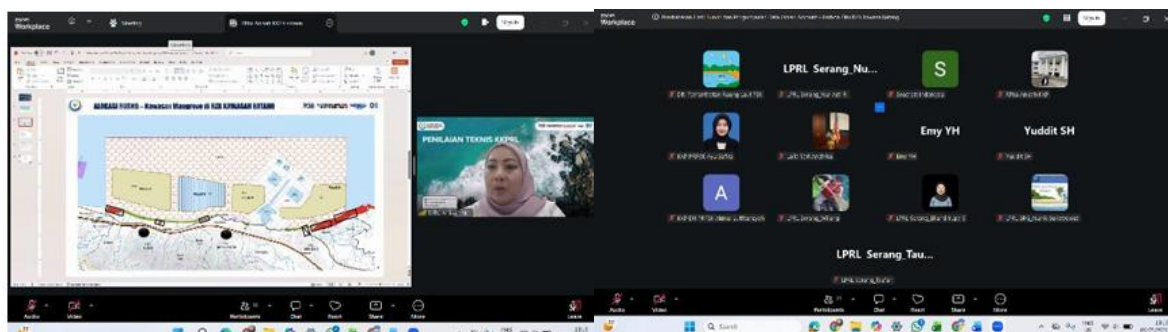
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini yaitu penggunaan anggaran dan ketersediaan SDM dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi secara daring dan berkolaborasi dengan pusat maupun instansi daerah.

F. Kegiatan Pendukung

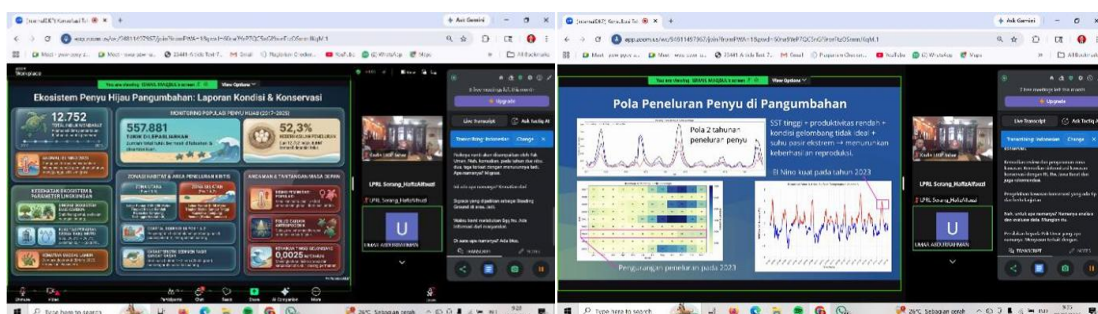
Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Rapat Persiapan Survei Lapang RZR Kawasan Batang
2. Pendampingan Kunjungan Lapangan Kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Rinci Kawasan Batang
3. Pembahasan hasil survei dan pengumpulan data Ocean Account Karbon Biru RZR Kawasan Batang



Gambar 5 Pembahasan Hasil Survei dan Pengumpulan Data Ocean Account-Karbon Biru RZR Kawasan Batang

4. Rapat Konsultasi Teknis Review Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Taman Penyu Pangumbahan



Gambar 6 Konsultasi Teknis Dokumen Kawasan Konservasi Taman Penyu Pangumbahan

5. Koordinasi bersama Katimja Perencanaan Rinci Kawasan terkait kegiatan pilot project penataan ruang laut berkelanjutan morodemak
6. Koordinasi bersama Katimja Perencanaan Rinci Kawasan terkait kegiatan identifikasi lokasi sedimentasi



7. Koordinasi bersama Katimja Perencanaan Rinci Prioritas terkait kegiatan RZR KBN Marunda
8. Persiapan Kick-off Penyusunan Masterplan Kawasan Pantura Jawa
9. Rapat Pengaturan Zona Kawasan dan Lahan Pergaraman dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi Lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)

SK. 2. Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang

Pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

IK. 4. Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau rencana zonasi. Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan KKPRL peran LPRL Serang yaitu melaksanakan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis adalah hasil dari penjumlahan *output* dari penyelenggaraan layanan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT.

Layanan penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh LPRL Serang meliputi:

- 1) Asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL
- 2) Penilaian teknis yang dilaksanakan UPT
- 3) Verifikasi lapangan penilaian teknis
- 4) Pengumpulan data investasi dan tenaga kerja
- 5) Sosialisasi ke Pelaku Usaha.

Penilaian teknis yang dilaksanakan oleh UPT memiliki kekhususan kriteria yang berbeda dengan Penilaian teknis yang dilakukan oleh Pusat. Kriteria ini mengacu pada Kepdirjen PKRL No.50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL yang menjelaskan bahwa penilaian teknis oleh UPT dilakukan pada permohonan KKPRL dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bersifat non strategis nasional
- 2) Tidak menggunakan cara reklamasi



- 3) Dalam 1 (satu) wilayah kerja unit pelaksana teknis
- 4) Luas permohonan kurang dari atau sama dengan 10 hektare
- 5) Bidang perikanan atau pariwisata
- 6) Dilakukan oleh perseorangan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau pelaku usaha dalam rangka tanggung jawab sosial.

Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menjumlahkan output penyelenggaraan KKPRL yang dilaksanakan oleh UPT, meliputi: asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL (Berita Acara), penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan (Berita Acara), verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL (Berita Acara) serta laporan investasi dan tenaga kerja dan jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPT (Laporan). Adapun formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penyelenggaraan} = ((BA_A \times n) + (L\ I\&L \times n) + (BA_P \times n) + (BA_V \times n) + (Ls \times n)) \times 100$$

Keterangan:

- BA_A : Jumlah berita acara asistensi dan/atau pendampingan permohonan KKPRL yang dilaksanakan UPT
- BA_P : Jumlah berita acara penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT per penugasan
- BA_V : Jumlah berita acara verifikasi lapang penilaian teknis KKPRL yang dilaksanakan UPT
- $L\ I\&L$: Jumlah laporan Investasi dan tenaga kerja yang dihasilkan
- Ls : Jumlah Sosialisasi KKPRL yang dilaksanakan UPT

n = bobot nilai, dimana:

$$BA_A \times n, \text{ nilai } n = 0,1$$

$$L\ I\&L \times n, \text{ nilai } n = 0,25$$

$$BA_P \times n, \text{ nilai } n = 0,3$$

$$BA_V \times n, \text{ nilai } n = 0,1$$

$$Ls \times n, \text{ nilai } n = 0,25$$

Penentuan bobot nilai didasarkan pada pengaruh terhadap layanan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, proporsi anggaran dan tingkat intervensi masing-masing kegiatan.

Jumlah maksimal yang dapat diklaim adalah sebagai berikut:

- BA asistensi dan/atau pendampingan = 12
- BA penilaian teknis = 36
- BA verifikasi lapangan = 12
- Laporan Investasi = 2

Rincian Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 8. Rincian Capaian IK 4 Tahun 2026

IK.4		Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	75	-	75	-

A. Capaian Indikator Kinerja 4 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 4 Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu :

- 1) Asistensi dan pendampingan permohonan KKPRL

Kegiatan pendampingan permohonan KKPRL menghasilkan output sebanyak 45 Berita Acara

- 2) Penilaian teknis yang dilaksanakan UPT

Penilaian teknis dengan kriteria pelaksanaan UPT sebanyak 83 subyek hukum dan penilaian teknis dengan kriteria pelaksanaan pusat sebanyak 112 subek hukum

- 3) Verifikasi lapang penilaian teknis

Verifikasi Lapang dalam rangka penilaian teknis telah dilakukan di satu lokasi.

- 4) Sosialisasi ke Pelaku Usaha

Belum dilaksanakan kegiatan Sosialisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2026, karena Indikator Kinerja ini baru muncul di tahun 2026 dengan ditetapkan unit Kerja LPRL Serang berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Kendala yang dihadapi adalah belum ditetapkan DIPA LPRL Serang sehingga kegiatan sosialisasi ke pelaku usaha belum dapat dilaksanakan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan dioptimalkan secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

- 1) Asistensi / pendampingan permohonan KKPRL
 - a. Asistensi pendampingan oleh Gerai Pelayanan Kalimantan Barat atas rencana permohonan PKKPRRL kegiatan Budi Daya Mutiara milik PT Sinar Sakti Sahabat Jaya di Desa Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Pada tanggal 4 Mei 2026
 - b. Asistensi pendampingan oleh Gerai Pelayanan Jawa Timur atas rencana permohonan PKKPRRL milik PT Dinar Darum Lestari Banyuwangi, Jawa Timur
 - c. Asistensi pendampingan permohonan oleh Gerai Pelayanan Jawa Timur atas rencana permohonan PKKPRRL kegiatan Budi Daya karang hias/koral milik PT Dunia Alam Mulia di Pantai Kapuran, Selat Bali, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Pada tanggal 13 dan 19 Mei 2026
 - d. Asistensi pendampingan oleh Gerai Pelayanan Kalimantan Barat atas rencana permohonan PKKPRRL kegiatan Wisata Tirata milik PT Sinka Island Park di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Mei 2026
 - e. Asistensi pendampingan oleh Gerai Pelayanan Jawa Timur atas rencana permohonan PKKPRRL kegiatan Dermaga pribadi milik Irjen. Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si di Perairan Selat Bali, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
 - f. Asistensi pendampingan oleh Gerai Pelayanan Pontianak atas rencana permohonan PKKPRRL kegiatan Budi Daya Mutiara milik PT Sinar Sakti Sahabat Jaya di Desa Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Pada tanggal 4 Mei 2026
- 2) Penilaian teknis yang dilaksanakan UPT



Sepanjang Triwulan II (April – Juni) telah dilaksanakan 38 kali penilaian teknis oleh UPT, lingkup LPRL Serang. Sejumlah 37 di antaranya merupakan jenis permohonan persetujuan dan 1 di antaranya merupakan konfirmasi. Adapun lebih rinci mengenai penilaian teknis UPT yang dilakukan oleh LPRL Serang pada Triwulan II terangkum pada Tabel 9.

Tabel 9. Daftar Penilaian Teknis oleh UPT lingkup LPRL Serang Triwulan II

No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek
Penilaian Teknis UPT					
1	PT SURI TANI PEMUKA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Barat	Persetujuan	1/04/2026
2	PT AFI LAUTAN INDONESIA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Barat	Persetujuan	6/04/2026
3	PT LOBSTECH INTI MAKMUR	Keramba Jaring Apung	Jawa Timur	Persetujuan	8/04/2026
4	CV PRIMA SUKSES MANDIRI	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	9/04/2026
5	JONI	Penginapan	Kalimantan Tengah	Persetujuan	17/04/2026
6	SURIANSYAH	Dermaga Wisata	Kalimantan Tengah	Persetujuan	20/04/2026
7	PT BENTALA KARYA GEMILANG	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	20/04/2026
8	CV VANNAMEI INDO PERSADA JURUAN DAYA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	21/04/2026
9	PT TANJUNG BUMI AKUAKULTUR INDONESIA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	21/04/2026
10	SISWANTO	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Tengah	Persetujuan	22/04/2026
11	POKDAKAN MAJU JAYA BERSAMA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Tengah	Persetujuan	22/04/2026
12	PT VANNAMEI INDO PERSADA BATUKERBUY	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	22/04/2026
13	CV INTI BUDIDAYA BERSAMA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	29/04/2026
14	PT Bhumi Jati Power PLTU Tanjung Jati B Unit 5/6	Peneggelaman Rumah Ikan	Jawa Tengah	Persetujuan	30/04/2026
15	H. SA'GA	Penginapan	Kalimantan Timur	Persetujuan	4/05/2026
16	CV VANAME INTINUSA PRIMA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	4/05/2026
17	TAKHESI ARMA ISEKI	Penginapan	Kalimantan Timur	Persetujuan	8/05/2026
18	PT. VIVA VANAME INTINUSA PRIMA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	11/05/2026

19	BLU SHRIMP ESTATE KALTENG	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Tengah	Persetujuan	18/05/2026
20	PT ANUGRAH BUWANA INDONESIA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Barat	Persetujuan	18/05/2026
21	CV JAYA TIRTA VANNAMEI	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	19/05/2026
22	CV LANCAR SEJAHTERA ABADI	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	19/05/2026
23	YOHANES SUGIANTO	Penginapan	Jawa Timur	Persetujuan	21/05/2026
24	PT GRIYA SUKSES MANDIRI	Resort dan Dermaga	Banten	Persetujuan	25/05/2026
25	PT SURI TANI PEMUKA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Tengah	Persetujuan	25/05/2026
26	MUHAMAD LUTHFI APRIZAL	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Tengah	Persetujuan	25/05/2026
27	AHMAD FACHRUDDIN	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Tengah	Persetujuan	26/05/2026
28	PT KARYA MANDIRI MARINE	Budidaya Karang	Jawa Timur	Persetujuan	3/06/2026
29	EKO SUPRIYANTO	Bagan Tancap	Jawa Tengah	Persetujuan	4/06/2026
30	JAENUDIN	Bagan Tancap	Jawa Tengah	Persetujuan	4/06/2026
31	PT Berkah Vannamei Satui	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Selatan	Persetujuan	8/06/2026
32	CV. BUDIDAYA BERSAMA SEJAHTERA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	10/06/2026
33	CV. ARTHA TUNAS MAKMUR	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	10/06/2026
34	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Peneggelaman Rumah Ikan	Jawa Tengah	Konfirmasi	24/06/2026
35	PT Bhumi Jati Power	Peneggelaman Rumah Ikan	Jawa Tengah	Persetujuan	24/06/2026
36	ADJIE SATRIA KIRANA PUTRA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Jawa Timur	Persetujuan	24/06/2026
37	PT Sri Kandi Aquarium	Budidaya Karang	Jawa Timur	Persetujuan	25/06/2026
38	PT PULAUMAS KHATULISTIWA	Pemanfaatan Air Laut untuk Budi Daya	Kalimantan Barat	Persetujuan	29/06/2026

3) Penilaian teknis yang dilaksanakan oleh Pusat

Sepanjang Triwulan II (April – Juni) telah dilaksanakan 60 kali penilaian teknis oleh Pusat dengan mengundang LPRL Serang. Sejumlah 48 di antaranya merupakan jenis permohonan persetujuan dan 12 di antaranya merupakan konfirmasi. Adapun lebih rinci mengenai penilaian teknis UPT yang dilakukan oleh LPRL Serang pada Triwulan II terangkum pada Tabel 9.

Tabel 9. Daftar Penilaian Teknis oleh Pusat lingkup LPRL Serang Triwulan II



No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek
1	PT Sungai Tabuk Industri	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Kalimantan Tengah	Persetujuan	1/04/2026
2	PT Indika Logistic & Support Services	Kegiatan Pembangunan Pelabuhan	Kalimantan Timur	Persetujuan	1/04/2026
3	PT Dharma Inti Bersama	Kegiatan Alih Muat Antar Kapal Lokasi 1	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/04/2026
4	PT Dharma Inti Bersama	Kegiatan Alih Muat Antar Kapal Lokasi 2	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/04/2026
5	PT Dharma Inti Bersama	Kegiatan Penempatan Material Hasil Keruk	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/04/2026
6	PT Dharma Inti Bersama	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Kawasan Industri Lokasi 1	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/04/2026
7	PT Dharma Inti Bersama	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Kawasan Industri Lokasi 2	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/04/2026
8	PT Indo Sea Food	Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Sebagai Pendingin Proses Steam Ikan	Jawa Tengah	Persetujuan	8/04/2026
9	PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Kegiatan Pipa HDPE sebagai Saluran Pembuangan Efluen Hasil Olahan IPAL dan Zona Pelindung	Banten	Persetujuan	8/04/2026
10	PT Rajawali Octorys Sundari	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Pertambangan Batuan Andesit	Banten	Persetujuan	13/04/2026
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Pelabuhan Perikanan Dadap	Jawa Barat	Konfirmasi	14/04/2026
12	PT Gunajaya Harapan Lestari	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat	Persetujuan	15/04/2026
13	PT Harta Alumina Indonesia	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Industri Bearing, Roda Gigi, dan Elemen Penggerak Mesin	Kalimantan Barat	Persetujuan	15/04/2026
14	PT Cirebon Energi Prasarana	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang PLTU dan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Jawa Barat	Persetujuan	16/04/2026
15	PT ASDP Indonesia Ferry	Kegiatan Pelabuhan Penyeberangan Kamal Barat	Jawa Timur	Persetujuan	20/04/2026
16	Lilik Kiptiyah	Kegiatan Kafe	Jawa Timur	Persetujuan	20/04/2026
17	PT Kalimantan Industrial Park Indonesia	Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Kalimantan Utara	Persetujuan	23/04/2026
18	PT Parsaoran Global Datatrans	Kegiatan SKKL ION Cable System-1 Segmen Serang - Maringgai	Banten	Persetujuan	24/04/2026
19	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Kegiatan Pelabuhan Perikanan	Banten	Konfirmasi	27/04/2026
No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek





No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek
20	PT Tri Yudha Dharma Indonesia	Kegiatan Penambangan Pasir Laut	Banten	Persetujuan	28/04/2026
21	PT Parsaoran Global Datatrans	Kegiatan SKKL ION Cable System-1 Segmen Tanjung Pakis - Toboali	Jawa Barat	Persetujuan	30/04/2026
22	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kegiatan Pelabuhan Tanjung Emas	Jawa Tengah	Persetujuan	30/04/2026
23	PT Galangan Samudera Madura	Kegiatan Penempatan Material Hasil Keruk	Jawa Timur	Persetujuan	30/04/2026
24	PT PLN Nusantara Power	Kegiatan Alur Pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Jawa Barat	Persetujuan	4/05/2026
25	PT Karya Teknik Utama	Kegiatan Dermaga dan Docking Kapal	DKI Jakarta	Persetujuan	5/05/2026
26	PT Gunanusa Utama Fabricators	Kegiatan Pembuangan Material Hasil Keruk	Banten	Persetujuan	5/05/2026
27	PT Gunanusa Utama Fabricators	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Banten	Persetujuan	5/05/2026
28	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Kegiatan Area Pengerukan dan Penempatan Material Hasil Keruk	Kalimantan Barat	Persetujuan	6/05/2026
29	PT Pertamina Hulu Energi OSES	Kegiatan Kabel Bawah Laut Rama B-Rama A, Yvonne AYvonne B Dan Risma A-Zelda A	DKI Jakarta	Persetujuan	7/05/2026
30	PT Pertamina Hulu Energi OSES	Kegiatan Pipa Bawah Laut Risma A – Zelda A	DKI Jakarta	Persetujuan	7/05/2026
31	PT Pertamina Hulu Energi OSES	Kegiatan Anjungan Produksi Rama A, Rama B, Risma A, Zelda A Serta Anjungan Pemboran East Nadia-1, North Farida-1, West Danilla-1 Dan East Danilla-1	DKI Jakarta	Persetujuan	7/05/2026
32	Dinas PUPR Kabupaten Berau	Kegiatan Pendalaman Alur Kapal dan Pembangunan Pengaman Pantai Derawan	Kalimantan Timur	Konfirmasi	7/05/2026
33	PT Tri Warako Utama	Kegiatan Galangan Kapal	Jawa Timur	Persetujuan	7/05/2026
34	PT. Mitra Samudera Kreasi	Kegiatan Ship to Ship Transfer	Kalimantan Timur	Persetujuan	11/05/2025
35	PT. Central Pondok Sejahtera	Kegiatan Dermaga dan Sarana Penunjang Resort	DKI Jakarta	Persetujuan	11/05/2025
36	PT Juata Karya Sentosa	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Kalimantan Utara	Persetujuan	26/05/2026
37	PT Cemindo Gemilang	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Industri Semen	Banten	Persetujuan	26/05/2026
38	PT. Balikpapan Chip Lestari	Kegiatan Dermaga dan Kolam Putar Penunjang Industri Pembekuan Ikan	Kalimantan Timur	Persetujuan	2/06/2026
39	PT. Berau Coal	Kegiatan Alih Muat Antar Kapal	Kalimantan Timur	Persetujuan	3/06/2026





No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek
40	PT. Budiono Madura Bangun Persada	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Pengangkutan Garam	Jawa Timur	Persetujuan	5/06/2026
41	PT. Kutai Timber Indonesia	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Jawa Timur	Persetujuan	5/06/2026
42	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kegiatan Revitalisasi Dermaga	DKI Jakarta	Konfirmasi	10/06/2026
43	BUT Husky CNOOC Madura Limited	Kegiatan WHP Lapangan MBH, WHP Lapangan MDA, WHP Lapangan MDK, WHP Lapangan MBF, dan FPU Trunojoyo	Jawa Timur	Persetujuan	10/06/2026
44	PT. PLN Indonesia Power	Kegiatan Outfall Air Limbah Bahang	Jawa Tengah	Persetujuan	11/06/2026
45	PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Kawasan Industri	Kalimantan Barat	Persetujuan	12/06/2026
46	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	Kegiatan Pipa Penyalur Bawah Laut Baru 10" MOL BC	Jawa Barat	Persetujuan	15/06/2026
47	PT Saka Putra Perkasa	Kegiatan Terminal Khusus Penunjang Pertambangan Batubara dan Pembuangan Air Limbah	Kalimantan Utara	Persetujuan	17/06/2026
48	PT Pelindo Solusi Maritim	Kegiatan Perawatan, Perbaikan, dan Pembangunan kapal, serta Area Sandar Kapal	DKI Jakarta	Persetujuan	17/06/2026
49	PT Graha Power Kaltim	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri serta Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	Kalimantan Timur	Persetujuan	18/06/2026
50	PT Biru Arnawama Timur	Kegiatan Ship to Ship Transfer Lokasi A dan Lokasi B	Kalimantan Timur	Persetujuan	22/06/2026
51	PT Genta Sukses Utama	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Kalimantan Timur	Persetujuan	22/06/2026
52	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke	DKI Jakarta	Konfirmasi	23/06/2026
53	BUT Saka Indonesia Pangkah Limited	Kegiatan Sumur TGDW-1, Lapangan Tunggadewi, Wilayah Kerja Pangkah	Jawa Timur	Persetujuan	23/06/2026
54	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Pelabuhan Perikanan Dadap	Jawa Barat	Konfirmasi	24/06/2026
55	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kegiatan Revitalisasi Dermaga	DKI Jakarta	Konfirmasi	24/06/2026
56	PT Dua Samudera Perkasa	Kegiatan Dumping Area Kab. Kota Baru	Kalimantan Selatan	Persetujuan	26/06/2026
57	PT Jhonlin Group	Kegiatan Dumping Area Kab. Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	Persetujuan	26/06/2026



No	Subjek Hukum	Detail Kegiatan	Lokasi	Jenis Permohonan	Tanggal Pentek
58	PT Pelabuhan Talenta Bumi	Kegiatan Ship to Ship Transfer	Kalimantan Timur	Persetujuan	26/06/2026
59	PT Maritim Samudera Jaya	Kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Banten	Persetujuan	29/06/2026
60	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Kegiatan Pembuangan Material Hasil Pengerukan	Banten	Persetujuan	29/06/2026

4) Kegiatan Lainnya:

- Rapat Pemeriksaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT Orela Shipyard
- Koordinasi dan Pendampingan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Investasi Provinsi Banten
- Rapat Pembahasan Addendum ANDAL dan RKL-RPL PT Dok Pantai Lamongan
- Bimbingan Teknis Ekosistem Pesisir
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Lingkup PRL Serang
- Bimbingan Teknis Perizinan Dasar Berusaha di Gunungkidul



Gambar 7 Bimbingan Teknis Perizinan di Gunungkidul

- Rapat Sinkronisasi Progres Permohonan KKPR dan Pendataan Lokasi KNMP
- Koordinasi Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Banten
- Mengikuti sinkronisasi pemanfaatan ruang laut tahun 2026 di Provinsi Banten

SK.3.Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang

Pencapaian sasaran kegiatan Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

IK.5. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)

Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang meliputi beberapa indikator pembentuk yaitu:

- 1) Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- 2) Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- 3) Perwujudan RTR/RZ
- 4) Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting
- 5) Dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Cara menghitung capaian Indikator Kinerja ini adalah dengan menjumlahkan persentase indikator pembentuk sebagaimana formula berikut ini:

$$\sum n = \frac{\%V + \%W + \%X + \%Y + \%Z}{\text{Jumlah Indikator Pembentuk}}$$

Keterangan:

- $\sum n$: Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ yang dilaksanakan oleh UPT
- $\%V$: Persentase Data Penilaian Pelaksanaan KKPRL
- $\%W$: Persentase Data Hasil Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
- $\%X$: Persentase Jumlah Dokumen RTR/RZ yang dikumpulkan data IPU-nya
- $\%Y$: Persentase Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting di tahun berjalan
- $\%Z$: Persentase dukungan data untuk proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut

Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang pada Triwulan II 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Rincian Capaian IK 5 Tahun 2025

IK.5		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPSPL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	100	-	100	-

A. Capaian Indikator Kinerja 5 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 5 Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang

belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena Indikator Kinerja ini baru muncul di tahun 2026 dengan ditetapkannya unit Kerja LPRL Serang berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV. Kendala yang dihadapi adalah belum ditetapkannya DIPA LPRL Serang sehingga proses capaian IKU terhambat di tahapan perencanaan kegiatan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target IKU ini yaitu penggunaan anggaran dan ketersediaan SDM dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi secara daring dan berkolaborasi dengan instansi daerah terdekat.

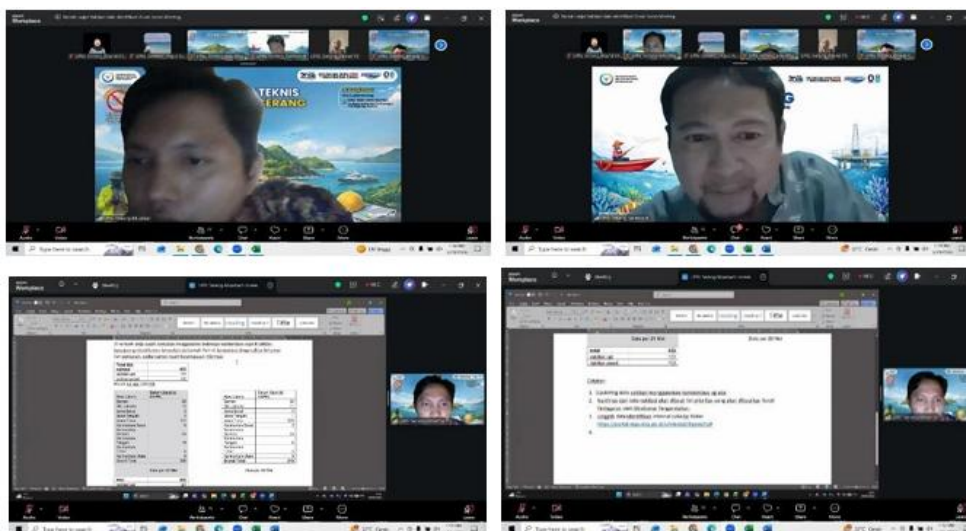
F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Asistensi Penyampaian Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya di Bogor
2. Pembahasan Permohonan Peninjauan Kembali dan Kebijakan atas Penerbitan PKKRL yang berada di wilayah PT Garam
3. Rapat Tindak Lanjut percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL)



4. Konsultasi dan pendampingan Laporan Tahunan KKPRL BPPP Banyuwangi zoom meeting identifikasi KKPRL di wilayah kerja LPRL Serang
5. Pertemuan zoom meeting dalam rangka Identifikasi KKPRL di wilayah kerja LPRL Serang
6. Pembahasan tindak lanjut instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terkait optimalisasi perolehan PNBP PKKRL
7. Pembahasan kegiatan dan rencana anggaran tahun 2026
8. Rapat Identifikasi Data TUKS dan Penggelaran Pipa/Kabel Laut Hasil Pengawasan
9. Rapat Validasi Data Identifikasi KKPRL belum berizin dan draft surat peringatan kepada subyek hukum
10. Menindaklanjuti Surat PT Angels Product Nomor 018/AP/2026 tanggal 18 Mei 2026 perihal Kronologis Permasalahan PKKRL PT Angels Products
11. Ekspose lanjutan dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran administratif PT. Maritim Samudera Jaya yang diproses oleh Pangkalan PSDKP Jakarta
12. Pembahasan tindak lanjut instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terkait optimalisasi perolehan PNBP PKKRL
13. Rapat Validasi Data Identifikasi KKPRL belum berizin dan draft surat peringatan kepada subyek hukum



Gambar 8 Rapat Tindak Lanjut Validasi Data Identifikasi KKPRL belum berizin

SK.4. Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang

Pencapaian sasaran kegiatan Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu

IK.6. Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)

Indikator Kinerja Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang dilakukan untuk menjawab isu strategis DJPRL yakni pelibatan masyarakat yang bermakna. Identifikasi pemahaman masyarakat dilakukan mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut dilakukan melalui survei dan *Focus Group Discussion* pemahaman penataan ruang laut kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Cara menghitung capaian Indikator kinerja ini adalah menjumlahkan lokasi (kabupaten/kota yang memiliki pesisir) yang telah dilaksanakan identifikasi pemahaman masyarakat penyelenggaraan penataan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang. Terdapat empat lokasi yang dijadikan target pada tahun 2026 yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Provinsi Jawa Barat.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Rincian Capaian IK 6 Tahun 2026

IK.6		Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	3	-	3	-

A. Capaian Indikator Kinerja 6 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu identifikasi kelompok masyarakat, peninjauan kerjasama, identifikasi wilayah karbon biru, dan mengikuti pembahasan mengenai rencana tata kelola karbon biru di wilayah Jawa Tengah.

Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV, tetapi persentase kegagalan pencapaian Indikator ini kemungkinan besar dapat terjadi apabila DIPA LPRL Serang tidak kunjung ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target ini yaitu penggunaan anggaran dan ketersediaan SDM dimana kegiatan ini dapat dilakukan dengan koordinasi secara daring dan berkolaborasi dengan instansi daerah terdekat.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain yaitu

1. Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan PT PLN (Persero)
2. Penyampaian Laporan Pengelolaan Coral Stock Center Loka PSPL Serang di Perairan Banten Desa Sukarame
3. Rapat Finalisasi rancangan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang
4. Asistensi kegiatan monitoring terumbu karang PT Candra Asri Alkali
5. Laporan Pemanfaatan Ruang Pesisir Hasil Sedimentasi melalui Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat
6. Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Kelompok Masyarakat Wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.



7. Rapat Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan Mitra Kerja Sama.
8. Penyampaian surat perihal Pemanfaatan Ruang Pesisir Hasil Sedimentasi melalui Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat.
9. Menghadiri kegiatan tranplantasi karang di area KKPRL Sukarame



Gambar 9 Identifikasi kelompok masyarakat di Kabupaten Lebak

10. Mendampingi tim survei dan verifikasi calon lokasi karbon biru di Jawa Tengah
11. Menghadiri rapat koordinasi Penentuan Lokasi Potensi Karbon Biru di Provinsi Jawa Timur
12. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang laut di DKP Provinsi DI Yogyakarta
13. Kunjungan lapang ke Ujung Pangkah, Gresik dan Romokalisari, Surabaya yang sebagai identifikasi awal penentuan Lokasi karbon biru di Jatim
14. Keterlibatan menjadi Narasumber Kegiatan kunjungan lapang (field trip) Valuasi Ekonomi Fungsi Ekosistem Pesisir Akibat Dampak Pembangunan Tol di Kawasan Pesisir Kota Semarang Jawa Tengah

SK.7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang

Pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu

IK. 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup LPRL Serang (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Lingkup LPRL Serang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP lingkup LPRL Serang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- a. Perencanaan kinerja (30%)

- b. Pengukuran kinerja (30%)
- c. Pelaporan kinerja (15%), dan
- d. Evaluasi kinerja (25%).

Cara menghitung pencapaian indikator ini yaitu

1. Nilai PM SAKIP lingkup LPRL Serang adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu :

Tabel 11. Interpretasi dari Predikat dan Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.



Rincian Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPS Serang (Nilai) pada Triwulan II 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Rincian Capaian IK 7 Tahun 2026

IK.7		Nilai PM SAKIP lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPSPS Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	70	-	70	-

A. Capaian Indikator Kinerja 7 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Serang (Nilai) belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai akhir tahun atau Triwulan IV 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Triwulan II tahun 2026 Nilai PM SAKIP Lingkup LPRL Serang tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena tidak ada pengukuran capaian pada Triwulan II 2025 maupun Triwulan II 2026. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu penyusunan dokumen pendukung capaian/pengukuran kinerja, antara lain penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Level II, Manual IKU Level II, Rincian Target IKU Level II, dan Rencana Aksi (Renaksi) Level II, serta pengumpulan dokumen Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV, tetapi persentase kegagalan pencapaian Indikator ini kemungkinan kecil dapat terjadi karena kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun.



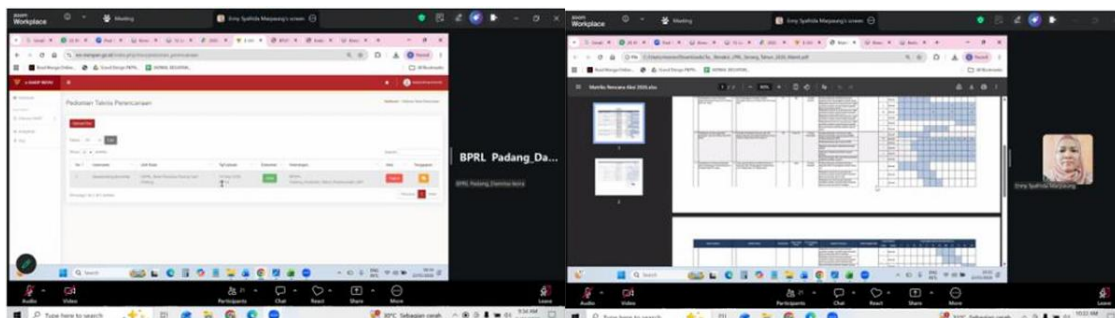
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran yaitu dalam pengumpulan dokumen telah menggunakan teknologi informasi (penyimpanan data secara *online*).

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Sosialisasi Penginputan Aplikasi Kinerja serta Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Setditjen PRL dan DJPRL tanggal 7 s.d 9 April 2026
2. Menghadiri undangan Kick Off Meeting Pengendalian Terpadu Tahun 2026 dan Peluncuran e-Monev Bappenas Generasi 4 tanggal 9 dan 13 April 2026
3. Menghadiri Undangan Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL Triwulan I Tanggal 15 April 2026
4. Penyampaian usulan perubahan anggota tim pengelola kinerja LPRL Serang ke Sesditjen PRL tanggal 9 April 2026
5. Reviu Revisi DIPA untuk Penggunaan Anggaran PNBPN dan Pengaktifan DIPA UPT lingkup DJPRL tanggal 23 April 2026
6. Persiapan Reviu Revisi DIPA untuk Penggunaan Anggaran PNBPN dan Pengaktifan DIPA UPT lingkup DJPRL Tahun 2026 pada tanggal 4 Mei 2026
7. Rapat Pra-Evaluasi SAKIP lingkup DJPRL Tanggal 22 Mei 2026
8. Tindaklanjuti atas catatan hasil reviu Itjen terkait revisi anggaran penggunaan PNBPN dan pengaktifan DIPA UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut 26 Juni 2026
9. Evaluasi AKIP Level 2 lingkup DJPRL Tanggal 22-25 Juni 2026



Gambar 10 Rapat Pra-Evaluasi SAKIP Lingkup DJPRL Tahun 2026



IK.8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- 1) Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- 2) Baik, apabila NKA >80 - 90;
- 3) Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- 4) Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- 5) Sangat Kurang, apabila ≤ 50

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 13. Bobot NKPA Satker

Variabel	Uraian	Bobot
a. Efektivitas (75)	1). Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2). Nilai Efektivitas Satker	45
b. Efisiensi (25)	3). Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPI_i}{TIKPI_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis



2) Nilai Efektivitas Satker

$$Nef\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

$RVRO_i$: Realisasi Volume RO i

$TVRO_i$: Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

1. Nilai Efisiensi Satker

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

Keterangan :

NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{Satker} : Nilai Efisiensi Satker

W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

$WNEf_{satker}$: Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE_{Satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Rincian Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel 17 berikut ini

Tabel 14. Rincian Capaian IK 8 Tahun 2026

IK.8		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2026-2029	
Target TW II	Realisasi TW II 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	-	-	-	71,5	-	71,5	-

A. Capaian Indikator Kinerja 8 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang belum dapat diukur, karena Indikator ini diukur secara tahunan dan ditargetkan tercapai di Triwulan IV Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II 2026, belum ditetapkan DIPA pada satker LPRL Serang



B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II pada tahun sebelumnya, karena unit kerja LPRL Serang baru ditetapkan tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP 29 Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Sampai dengan Triwulan II 2026 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya IKM ini yaitu Penyusunan TOR-RAB kegiatan dan anggaran tahun 2026 yang bersumber dari RM dan PNPB dan Pengajuan usulan penetapan KPA.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran, dimana dalam pencapaian target IK ini tidak terdapat anggaran khusus serta penginputan data secara online melalui aplikasi SAKTI.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IK yaitu

1. Reviu Revisi DIPA untuk Penggunaan Anggaran PNPB dan Pengaktifan DIPA UPT lingkup DJPRL tanggal 23 April 2026
2. Persiapan Reviu Revisi DIPA untuk Penggunaan Anggaran PNPB dan Pengaktifan DIPA UPT lingkup DJPRL Tahun 2026 pada tanggal 4 Mei 2026
3. Revisi DIPA LPRL Serang tanggal 18 Mei 2026
4. Tindakan lanjut atas catatan hasil reviu Itjen terkait revisi anggaran penggunaan PNPB dan pengaktifan DIPA UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut 26 Juni 2026

IK. 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara

perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- 1) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- 2) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- 3) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- 4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan rumus:

Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}$
dimana

- a) Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b) Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Indikator yang dinilai terdiri dari 8 (delapan) Indikator sebagai berikut:

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
 - a. Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
 - b. Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
 - c. Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA \text{ Rev} = IKPA \text{ Rev} = \frac{\sum_{t=1}^n RRev \ n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
 - a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) bulanan
 - b. Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
 - c. Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RDP, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik



Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{ BPeg } n - \text{RPD BPeg } n||}{\text{RPD B Peg } n} \times 100$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPA BBar} = \frac{||R \text{ BBar } n - \text{RPD BBar } n||}{\text{RPD B Bar } n} \times 100$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{ BMod } n - \text{RPD BMod } n||}{\text{RPD B Mod } n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{DevDIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{DevDIPA BMod}||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$[TA] _n = TPBPeg + TPBBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$[TPBelPeg] _n = \text{Pagu BPeg} \times \text{Target BPeg Tw ke } -n$$

$$[TPBelBar] _n = \text{Pagu BBar} \times \text{Target BBar Tw ke } -n$$

$$[TPBelMod] _n = \text{Pagu BMod} \times \text{Target BMod Tw ke } -n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$[NKPA] _n = ((PA_n) / ((TP_n)) \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak



- c. Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- d. Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, Triwulan I 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
 - a. Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
 - b. 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
 - c. Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM LS TW}{SPM LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
 - a. Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
 - b. Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
 - c. Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- d. Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- e. Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- f. Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%

- a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- b. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- c. Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- a. Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- b. Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = (\sum_{i=1}^n \text{ROKW}) / n$$

- c. Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan Triwulan I berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- d. RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK\text{-CRO} = ((\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}) / \text{Target RO}) / n$$

- e. Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA\text{-CRO} = (NK\text{-ROKW} \times 30\%) + (NK\text{-CRO} \times 70\%)$$

Rincian Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel 16.



Tabel 15. Rincian Capaian IK 9 Tahun 2026

IK.9		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	89.5	-	89.5	-

A. Capaian Indikator Kinerja 9 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPRL Serang belum dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai di akhir Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum ditetapkan DIPA pada satker LPRL Serang sehingga kinerja pelaksanaan anggaran belum dapat diukur.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKM ini pada Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II pada tahun sebelumnya, karena target pada IKM ini diukur secara tahunan pada akhir tahun anggaran.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Namun sampai dengan Triwulan II DIPA LPRL Serang belum memiliki DIPA.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran, dimana dalam penyampaian usulan Revisi DIPA dan Hal III DIPA dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di <https://sakti.kemenkeu.go.id/>, selain itu juga, dalam pengajuan SPM dapat juga dilakukan secara online melalui aplikasi Portal Digital Ditjen Perbendaharaan (e-SPM) di <https://espm.kemenkeu.go.id/>, sehingga dapat menghemat anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain:



1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KPPN Serang tanggal 9 April 2026
2. Menghadiri Sosialisasi Pelaporan Capaian Output Tanggal 02 April 2026
3. Penyusunan bahan capaian output bulanan
4. Melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka koordinasi keuangan Tanggal 02 April 2026
5. Rapat Capaian Output DJPRL tanggal 23 April 2026
6. Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output TA 2026 pada Aplikasi SAKTI dan MyIntress
7. Penyampaian SPJ Operasional rutin bulanan dan Perjalanan Dinas
8. Bimbingan Teknis Implementasi Interoperabilitas Sistem dalam Rangka Simulasi Proses Revisi DIPA (SAKTI - Nadine) Tanggal 18 Juni 2026
9. Bimbingan Teknis Pelaporan Data Capaian Output Tahun 2026 Tanggal 19 Juni 2026

IK. 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LPRL Serang sampai dengan waktu pengukuran. Indikator Kinerja ini dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPRL Serang}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPRL Serang}} \times 100$$

Keterangan : Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Rincian Capaian IK 10 Tahun 2026

IK.10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2025
-	-	81	100	120	81	120	81	120

A. Capaian Indikator Kinerja 10 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang pada Triwulan II, tercapai 100% dari target 81%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilengkapi dan dipenuhi oleh LPRL Serang sampai dengan Triwulan II sebagaimana terpantau dalam aplikasi SIDAK KKP (<https://sidak.kkp.go.id/>) Gambar 11. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang berhasil ditindaklanjuti meliputi P3D LPRL Serang dan hasil pengawasan operasional.



Gambar 11 Pemantauan Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen TW II

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II pada tahun 2025 karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP no.29 Tahun 2025

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Indikator Kinerja ini telah mengalami keberhasilan sampai dengan Triwulan II 2026. Faktor pendukung dalam tercapainya indikator kinerja ini adalah komitmen penanggung jawab kegiatan dalam melakukan perbaikan dan tindak lanjut dari hasil rekomendasi dari Inspektorat Jendral, serta menjaga koordinasi yang baik dengan Inspektorat Jenderal untuk menyamakan persepsi dan pemahaman.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran, dimana dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini tidak terdapat anggaran khusus.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Melaksanakan input aplikasi SIDAK terkait tindak lanjut Pengawasan Lainnya Identifikasi P3D LPRL Serang
2. Pelaksanaan audit Operasional tahun 2025/2026 tanggal 12 Mei-23 Mei 2026
3. Pemantauan tindaklanjut P3D di SIDAK tanggal 20-26 Mei 2026
5. Tindak lanjut hasil audit operasional pada LPRL Serang TA 2025/2026
6. Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan Mitra terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jendral KKP di LPRL Serang tanggal 18-20 Juni 2026

IK. 11. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan.

Target IK ini pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 Dokumen laporan SPIP. Target ini menyesuaikan dengan restrukturisasi organisasi dari LPSPL Serang menjadi LPRL Serang yang membuat Laporan SPIP Triwulan IV 2025 lingkup LPSPL Serang tidak bisa diklaim sebagai capaian LPRL Serang di Triwulan I 2026. Cara menghitung capaian IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini



Tabel 17. Rincian Capaian IK 11 Tahun 2025

IK.11		Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang (Dokumen)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	1	1	100%	3	-	3	33

A. Capaian Indikator Kinerja 11 Triwulan II Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja 11 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 memperoleh capaian sebesar 100% berdasarkan target pemenuhan satu dokumen laporan SPIP. Laporan SPIP Triwulan II LPRL Serang disusun rutin setiap triwulan dan telah disampaikan kepada Sesditjen PRL melalui Surat Dinas Kepala Loka PRL Serang Nomor B.100/LPSPL.2/TU.140/I/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Penyampaian laporan SPIP Triwulan II Tahun 2026 LPRL Serang



Gambar 12 Penyampaian Laporan SPIP Triwulan I

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Triwulan II 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II pada tahun 2025 karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan PermenKP 29 Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator Kinerja ini pada tahun 2026 memiliki total target sebanyak 3 dokumen. Sampai dengan Triwulan II telah disusun 1 dokumen laporan SPIP sehingga capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 adalah sebesar 33.3%

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan, karena selama tahun 2026 ditargetkan tercapai 3 laporan secara kumulatif dengan target triwulanan yang dimulai sejak Triwulan II.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran, dimana dalam pencapaian target IK ini tidak terdapat anggaran khusus.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan Laporan bulanan
2. Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan I 2026 dan Penetapan Akun Signifikan Lingkup DJPRL secara daring pada tanggal 13 Mei 2026
3. Pelaksanaan pengisian kuisisioner SPIP dan MR lingkup Dirjen PRL tahun 2026
4. Penyampaian Laporan SPIP Bulan Maret, April, Mei, dan Triwulan I
7. Rapat Bulanan Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM

IK. 12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

1. **Kualifikasi** bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Tabel 18. Bobot Dimensi Kualifikasi Pendidikan minimal diangkat kedalam Jabatan

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

2. **Kompetensi** bobot nilai 40

Tabel 19. Rincian Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22,5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

3. **Kinerja (Nilai SKP 1 Tahun)** bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

4. Disiplin bobot nilai 5

Tabel 20. Rincian Keterangan Nilai SKP dan Nilai Disiplin

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
1	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
2	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
3	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
4	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

5. Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 21. Rincian Kategori Nilai IP ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91 - 100
2	Tinggi	81 - 90
3	Sedang	71 - 80
4	Rendah	61 - 70
5	Sangat Rendah	0 - 60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin



$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j
 $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k
 $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l
 $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Rincian Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks) pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Rincian Capaian IK 12 Tahun 2025

IK.12		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang (Indeks)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	81	-	81	-

A. Capaian Indikator Kinerja 12 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang belum ada capaian target pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada akhir periode 2026. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pegawai LPRL Serang telah mengikuti berbagai macam pelatihan atau diklat fungsional yang dapat dikonversi kedalam JP sebagai salah satu komponen dalam penilaian indikator kinerja ini.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Triwulan II tahun 2026 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPRL Serang tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025, karena Unit Kera LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP No.29 tahun 2025

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja ini dipengaruhi oleh 4 faktor, dengan faktor yang paling menonjol adalah dimensi kompetensi, diikuti dengan dimensi kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Agar tercapai, setiap pegawai LPRL Serang diberikan IKI pemenuhan IP ASN sebanyak setara dengan diklat 20 JP sebagai pengungkit pada dimensi kompetensi. Dalam pemenuhan dimensi kinerja, LPRL Serang berupaya agar setiap pegawai memiliki indikator kinerja individu sehingga kinerja harian yang dilakukan dapat diukur dan dipenuhi dengan baik. Selain itu, pemantauan terhadap pegawai yang melakukan tugas/izin belajar menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan nilai pada dimensi kualifikasi dari tahun ke tahun.

Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir periode TW IV. Pemantauan yang dilakukan rutin sepanjang tahun menjadi krusial untuk memastikan pencapaian indikator ini tidak terhambat. Untuk mempermudah pemantauan pemenuhan IP ASN pegawai, LPRL Serang telah mengembangkan dashboard PILAR <https://www.pilarserang.web.id/db-sertifikat-ip-asn> yang dapat dilihat pada Gambar 12

MONITORING IP		
PNS (Mn 20 JP)		
1	Agus Sukumana 3 Sertifikat	23.00
2	Atikah Maulidiah 4 Sertifikat	25.00
3	Bayu Dwi Handoko 5 Sertifikat	31.00
4	Cecap Saparudin 6 Sertifikat	41.00
5	Elland Yupa Subhytta 6 Sertifikat	42.00
6	Erna Dwi Sociastuti 4 Sertifikat	25.00
7	Izanatur Rokmah 5 Sertifikat	27.00
8	Jawid Czaripgi 4 Sertifikat	32.00

Gambar 13 Pemantauan IP ASN Pegawai LPRL Serang melalui Website PILAR

D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target indikator kinerja ini yaitu anggaran dimana pelatihan dapat dilakukan secara daring, selain itu pegawai LPRL Serang menginput bukti keikutsertaan pelatihan atau bimbingan teknis ke sistem secara online sehingga dapat menghemat penggunaan anggaran untuk difokuskan untuk pengembangan kompetensi pegawai.

F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Orientasi PPPK Tanggal 07 April 2026
2. Sosialisasi Kebijakan Pemantauan dan evaluasi PPPK Tanggal 07 April 2026
3. Pembahasan SKP Tim Kerja Perencanaan dan Pengendalian LPRL Serang Tahun 2026 Tanggal 09 April 2026
4. Pembahasan dan Finalisasi Peta Proses Bisnis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian Tanggal 21 April 2026



5. Pelaksanaan evaluasi PJLP lingkup LPRL Serang tanggal 27 April 2026
6. Rapat Perpindahan Jabatan APJK ke PELP dan Kebutuhan Formasi PELP DJPRL tanggal 28 April 2026
7. Penyusunan ABK Kebutuhan Organisasi LPRL Serang
8. Verifikasi Presensi pegawai LPRL Serang tanggal 2 Juni 2026
9. Rapat pengelola sumber daya manusia aparatur pada unit organisasi 6 Mei 2026
10. Pelaksanaan evaluasi PJLP, PPPK Paruh Waktu dan Magang lingkup LPRL Serang tanggal 26 Mei 2026
11. Pemantauan dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Unit Pelaksana Teknis Ditjen Penataan Ruang Laut tanggal 17 Juni 2026
12. Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan V Tahun 2026 Tanggal 23-25 Juni 2026



Gambar 14 Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan V Tahun 2026

13. Pelaksanaan evaluasi PJLP, PPPK Paruh Waktu dan Magang lingkup LPRL Serang tanggal 30 Juni 2026



Gambar 15 Rapat evaluasi PJLP, PPPK Paruh Waktu, dan Magang Lingkup LPRL Serang

IK.13. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi lima komponen indikator yaitu 1). Mengumumkan informasi publik, 2). Menyediakan informasi publik, 3). Sarana dan prasarana, 4). Kelembagaan, dan 5). Digitalisasi.

Target IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang pada tahun 2026 sebesar 91. Rincian Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel 27

Tabel 23. Rincian Capaian IK 13 Tahun 2026

IK.13		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPSPL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	92	-	92	-

A. Capaian Indikator Kinerja 13 Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 13 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang belum ada capaian target pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 LPRL Serang dalam proses pelaksanaan *Self Assessment Questionnaire* Monitoring dan Evaluasi KIP dan memproduksi 11 konten publikasi di media sosial.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPRL Serang Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2026, karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan PermenKP no.29 Tahun 2025



C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja ini bergantung pada 5 faktor komponen penilaian yaitu: 1) Mengumumkan informasi publik, 2) Menyediakan informasi publik, 3) Sarana dan prasarana 4) Kelembagaan, 5) Digitalisasi. Dalam mendukung pemenuhan komponen penilaian tersebut terdapat dua buah kanal yang LPRL Serang kelola yakni Website PPID yang terintegrasi dengan website Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Media Sosial LPRL Serang berupa Instagram, Facebook dan Twitter. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini yaitu anggaran, karena dalam pelaksanaan, Tim PPID memanfaatkan penggunaan sosial media tanpa membayar (Website, Instagram, Facebook dan Twitter) untuk media publikasi LPRL Serang, sehingga dapat menghemat alokasi anggaran.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini antara lain :

1. Lokakarya Nasional 2026 Tanggal 16 April 2026
2. Publikasi melalui media sosial loka penataan ruang laut sebanyak 11 kali (Instagram LPRL Serang)



Gambar 16 Produksi konten Triwulan II di Media Sosial LPRL Serang

3. Permohonan informasi publik melalui saluran permohonan sebanyak 1 kali oleh Moch. Ridwan
4. Melaksanakan Upacara memperingati hari Lahir Pancasila tanggal 01 Juni 2026

5. Sosialisasi Strategi Komunikasi KKP tanggal 03 Juni 2026
6. Pemenuhan dokumen PPID: Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP
7. Penyampaian Laporan Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Bulan Februari 2026

IK. 14. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian Indikator Kinerja ini dihitung dengan menjumlah proposal Inovasi pelayanan Publik yang ditetapkan dalam berita acara penilaian oleh Tim Penilai Inovasi pelayanan Publik Ditjen PRL. Terdapat 2 inovasi yang akan diusulkan pada tahun 2026 yaitu PETA CARITA (Pemanfaatan Ruang Laut dan Ekosistem Terumbu Karang untuk Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat Carita) dan Si-Kristal (Simpul Informasi Keruangan Pesisir dan Tata Ruang Laut). Inovasi PETA Carita telah ditetapkan dalam Kepdirjen PRL Nomor 13 Tahun 2026 tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPRL Tahun 2026. Adapun Inovasi Si-Kristal ditargetkan menjadi capaian lebih bagi organisasi.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 24. Rincian Capaian IK 14 Tahun 2026

IK.14		Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2025
-	-	-	-	-	1	-	1	-

A. Capaian Indikator Kinerja 14 Triwulan II Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja 14 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang pada Triwulan II belum dapat diukur karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.



B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya, karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP no.29 Tahun 2025

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pemenuhan capaian indikator kinerja manajemen ini didasarkan pada keberhasilan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Beberapa indikator yang perlu dipantau adalah survey kepuasan masyarakat terhadap layanan LPRL Serang maupun penambahan nilai layanan yang diperoleh oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah belum ditetapkannya DIPA LPRL Serang TA 2026 sehingga implementasi inovasi di tahun 2026 masih di tahap perencanaan. Solusi yang dilakukan adalah mengumpulkan data dukung implementasi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

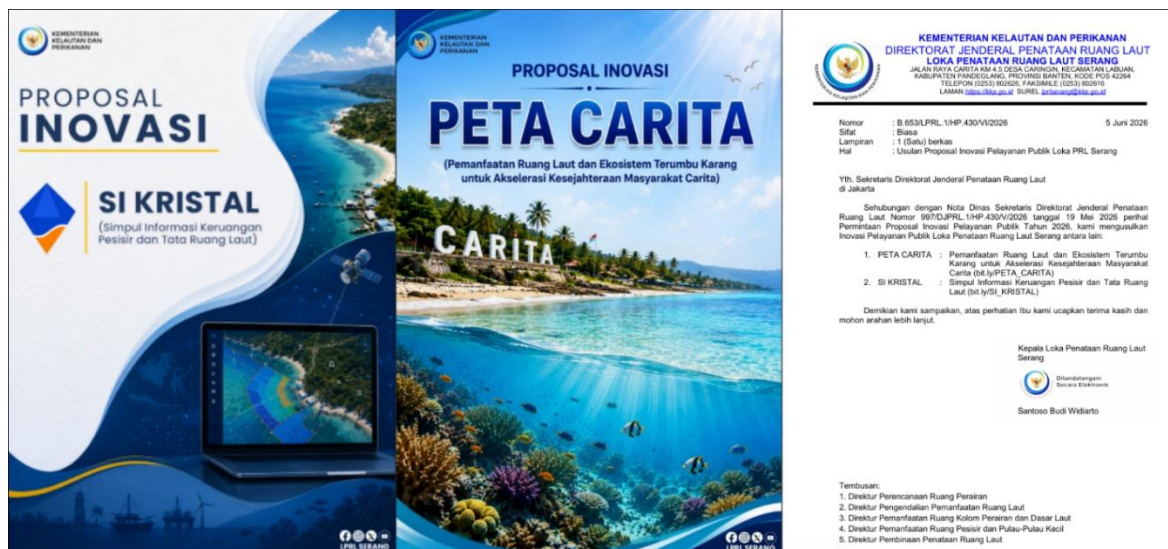
D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan dioptimalkan secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

E. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II 2026 kegiatan dalam rangka Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang telah dilakukan Penyusunan Proposal dan data dukung Inovasi PETA Carita dan Si Kristal. Porposal dan data dukung inovasi yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Sesditjen PRL melalui surat Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang Nomor B.653/LPRL.1/HP.430/VI/2026 Tanggal 5 Juni 2026 perihal Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Loka PRL Serang.





Gambar 17 PETA Carita dan SI KRISTAL sebagai Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik LPRL Serang

IK.15. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang (Nilai)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tujuan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal



Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Cara perhitungan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang, yaitu :

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek :
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek :
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa :

Tabel 25. Nilai dan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100
A	Memuaskan	> 80 – 90
BB	Sangat Baik	> 70 – 80
B	Baik	> 60 - 70
CC	Cukup	> 50 - 60
C	Kurang	> 30 - 50
D	Sangat Kurang	> 0 - 30



Rincian Capaian Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Rincian Capaian IK 15 Tahun 2026

IK.16		Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	75	-	75	-

A. Capaian Indikator Kinerja 16 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja 16 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPRL Serang belum ada capaian target pada Triwulan II Tahun 2025, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKM in pada Triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II di tahun sebelumnya karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP no.29 Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil identifikasi, Indikator Kinerja ini belum bisa diproyeksikan dapat mengalami keberhasilan/kegagalan. Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja ini akan dihitung pada akhir tahun atau Triwulan IV, tetapi persentase kegagalan pencapaian Indikator ini kemungkinan kecil dapat terjadi karena kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah penggunaan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan dioptimalkan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan database digital.



F. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini yaitu berupa pengelolaan Arsip harian dan sertifikasi SDM Kearsipan melalui PNPB Angkatan V Tahun 2026.



Gambar 18 Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan V Tahun 2026

IK.16. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. Target IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang pada tahun 2025 sebesar 77.

Teknik Menghitung :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100$$



Keterangan : Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang pada Triwulan II 2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 27. Rincian Capaian IK 16 Tahun 2026

IK.17		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang (Nilai)						
Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2026		Matrik Indikator Kinerja dan Anggaran LPRL Serang 2025-2029	
Target TW II	Realisasi TW II 2025	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2026	% Realisasi terhadap Target PK	Target 2026	% Capaian terhadap Target 2026
-	-	-	-	-	77	-	77	-

A. Capaian Indikator Kinerja 16 Triwulan II Tahun 2026

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang belum ada capaian pada Triwulan II Tahun 2026, karena Indikator ini ditargetkan tercapai secara tahunan atau pada Triwulan IV Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPRL Serang Triwulan II tahun 2026 tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, karena Unit Kerja LPRL Serang baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan Permen KP no.29 Tahun 2025.

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dan tidak memiliki target triwulan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II belum dapat diukur dan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian Indikator Kinerja ini dipengaruhi oleh kinerja anggaran. Sampai saat ini belum ada penetapan DIPA di LPRL Serang yang membuat belum adanya rincian pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan. Oleh karena itu belum ada pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini yaitu anggaran, karena dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan aplikasi SIRUP yang dapat diakses setiap waktu.

F. Kegiatan Pendukung

Sampai dengan Triwulan II 2026, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja ini yaitu berupa Pembahasan KAK dan HPS Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Pagu Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, LPRL Serang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat penetapan DIPA pada satker LPRL Serang. Proses penetapan DIPA masih dalam tahap pengajuan usulan penetapan KPA. Oleh karena itu belum terdapat rincian pagu anggaran maupun realisasi keuangan yang dapat disajikan pada laporan Triwulan II Tahun 2026.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPRL Serang Triwulan II 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja LPRL Serang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian sepuluh Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dan lima Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung Lima Sasaran Kegiatan. Pengukuran Kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dengan membandingkan realisasi dan target pada periode bersangkutan. Berdasarkan pengukuran kinerja, didapatkan Nilai Kinerja Organisasi LPRL Serang Triwulan II Tahun 2026 sebesar **112%** yang termasuk ke dalam kategori **istimewa**.

Terdapat dua indikator yang berkontribusi terhadap nilai capaian pada Triwulan II 2026 yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang telah terealisasi 100% dari target Triwulan II 2026 yaitu 81% (Persentase capaian 120%).
2. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPRL Serang telah terealisasi satu dokumen dari target Triwulan II 2026 yaitu satu dokumen (Persentase capaian 100%)

Kinerja LPRL Serang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 LPRL Serang belum memiliki DIPA mandiri dan masih menggunakan DIPA dari Setditjen PRL, oleh karena itu belum terdapat rincian pagu anggaran maupun realisasi keuangan yang dapat disajikan pada laporan Triwulan II Tahun 2026.

4.2 Permasalahan dan Saran Perbaikan

Pelaksanaan kinerja Loka Penataan Ruang Laut Serang pada Triwulan II Tahun 2026 masih diwarnai oleh proses penyesuaian sebagai dampak transformasi organisasi dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang menjadi Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang yakni belum terbitnya DIPA LPRL Serang TA 2026 sehingga proses capaian IKU terhambat di tahapan perencanaan kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian target indikator kinerja pada periode selanjutnya yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan pusat terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran LPRL Serang Tahun 2026;
2. Penyesuaian Rencana Aksi berdasarkan usulan/penetapan DIPA LPRL Serang Tahun 2026; dan
3. Melaksanakan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pengawasan dan penyampaian pelaporan SPIP Triwulan III.



4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan bukti sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Bukti Dukung
1	Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Unit Pusat terkait penyelesaian proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2026.	Telah dilakukan koordinasi dengan Sesditjen PRL dan Inspektorat Jenderal terkait penyelesaian proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2026	1. Catatan Hasil Reviu Itjen Tahun 2026 2. Draft RKAKL LPRL Serang 2026 2. Penyampaian Usulan Kegiatan dan anggaran sumber dan PNB 3. Tanggapan atas Permohonan Penambahan Alokasi Anggaran 4. Undangan Revisi DIPA Penggunaan PNB dan Pengaktifan DIPA UPT Lingkup DJPRL Tahun 2026
2	Melaksanakan Dialog Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan	Telah dilakukan Dialog Kinerja yang dipimpin oleh Kepala LPRL Serang pada tanggal 1 April berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan	Pelaksanaan Dialog Kinerja LPRL Serang Tahun 2026
3	Melaksanakan monitoring terhadap capaian pelaporan SPIP dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	Telah dilakukan pemantauan SPIP Triwulan I dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2026 lingkup LPRL Serang 2. Laporan SPIP Triwulan I 3. Monitoring hasil SIDAK Triwulan I 4. Pemantauan IP ASN Triwulan I



LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 LPRL Serang (11 Maret 2026)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Santoso Budi Widiarto**

Jabatan : Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Serang

Santoso Budi Widiarto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	2
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	3
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Serang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Serang (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Serang (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Serang (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun LPRL Serang	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN LPRL Serang (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Serang (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang (Nilai)	75
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Serang (%)	77

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Tahun 2026		4.200.000.000

Jakarta, 11 Maret 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Serang

Santoso Budi Widiarto



2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 LPRL Serang (20 Januari 2026)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Santoso Budi Widiarto**
Jabatan : Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Serang

Santoso Budi Widiarto



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA PENATAAN RUANG LAUT (LPRL) SERANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPRL Serang	1.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Perairan dan Rencana Zonasi di Wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	2
		2.	Persentase Wilayah yang difasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan Pesisir di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	80
		3.	Kawasan yang difasilitasi Pendampingan penyusunan Rencana Zonasi Rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau Kecil di wilayah Kerja LPRL Serang (Kawasan)	3
2.	Terselenggaranya Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di di Wilayah Kerja LPRL Serang	4.	Nilai Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Nilai)	75
3.	Terlaksananya dukungan pengendalian pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	5.	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan nya sesuai RTR/RZ di Wilayah Kerja LPRL Serang (%)	100
4.	Teridentifikasinya Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang	6.	Lokasi yang telah dilakukan Identifikasi Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPRL Serang (Lokasi)	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPRL Serang	7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPRL Serang (Nilai)	70
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) LPRL Serang (Nilai)	71,75
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPRL Serang (Nilai)	89,5
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPRL Serang (%)	81
		11.	Laporan SPIP yang disusun LPRL Serang	3
		12.	Indeks profesionalitas ASN LPRL Serang (Indeks)	81
		13.	Nilai keterbukaan informasi publik LPRL Serang (Nilai)	92
		14.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada LPRL Serang (Inovasi)	1
		15.	Nilai pengawasan kearsipan internal LPRL Serang (Nilai)	75
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LPRL Serang (%)	77



Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	3.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PRL	1.000.000.000
Total Anggaran Loka Penataan Ruang Laut (LPRL) Serang Tahun 2026		4.200.000.000

Jakarta, 20 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Loka Penataan Ruang Laut
Serang

Santoso Budi Widiarto



3. Penghargaan yang diperoleh LPRL Serang periode Triwulan II

